

Sistem Informasi Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU Berbasis *Website*

Yolanda Olivia Fadillah Dwiyanti^{1,*}, Yahfizham²

^{1,2} Sains dan Teknologi, Sistem Informasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: ^{1,*}yolandaolivia216@gmail.com, ²yahfizham@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan website interaktif dan responsif untuk pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya efisiensi dan akurasi dalam pendataan, serta keterbatasan aksesibilitas data bagi pihak berkepentingan dan masyarakat. Sistem pendataan saat ini tidak memadai, menghambat transparansi dan partisipasi aktif. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan website yang memungkinkan pendataan online dengan antarmuka yang mudah digunakan. Metode pengembangan sistem waterfall diterapkan, meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Website ini diharapkan mengoptimalkan proses pengumpulan data, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat pengambilan keputusan. Pelatihan staf dan kebijakan transparansi informasi juga diterapkan untuk mendukung kelancaran proses kerja dan meningkatkan aksesibilitas data bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sistem pendataan yang efisien dan akurat, meningkatkan kualitas layanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan mendukung keterbukaan informasi. Dengan adanya website ini, proses pendataan diharapkan menjadi lebih transparan dan partisipatif, memberikan manfaat signifikan bagi pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Sistem Informasi; Website Interaktif; Responsif; Kesejahteraan Sosial; SetdaprovSU

Abstract

This research aims to design and develop an interactive and responsive website for data collection of people with social welfare problems at the People's Welfare Bureau of the Regional Secretariat of North Sumatra Province. The main problem faced is the lack of efficiency and accuracy in data collection, as well as limited data accessibility for interested parties and the community. The current data collection system is inadequate, hampering transparency and active participation. The proposed solution is the development of a website that enables online data collection with a user-friendly interface. The waterfall system development method is applied, covering planning, analysis, design, implementation, and maintenance. The website is expected to optimise the data collection process, increase efficiency, and speed up decision-making. Staff training and information transparency policies were also implemented to support smooth work processes and improve data accessibility for the community. The purpose of this research is to create an efficient and accurate data collection system, improve the quality of service of the People's Welfare Bureau of the Regional Secretariat of North Sumatra Province, and support information disclosure. With this website, the data collection process is expected to become more transparent and participatory, providing significant benefits to stakeholders.

Keywords: Information System; Interactive Website; Responsive; Social Welfare; SetdaprovSU

1. PENDAHULUAN

Digitalisasi telah menjadi kebutuhan esensial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pemerintahan. Biro Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SETDAPROVSU) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sistem pendataan yang digunakan saat ini kurang efisien dan tidak mampu memenuhi kebutuhan data yang cepat dan akurat. Masalah utama dalam sistem yang ada meliputi waktu yang lama untuk mengumpulkan data, risiko kesalahan data karena proses manual, dan kesulitan dalam mengakses informasi secara cepat oleh pihak yang berkepentingan.[1] Selain itu, keterbatasan aksesibilitas data bagi pihak berkepentingan dan masyarakat umum menghambat transparansi dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program kesejahteraan sosial yang sedang berjalan, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas program tersebut. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengelolaan data agar lebih efisien, akurat, dan transparan.[2] Penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan website interaktif dan responsif yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengumpulan data. Website ini akan dirancang untuk memungkinkan proses pendataan dilakukan secara online, sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data PMKS. Dengan sistem yang lebih terotomatisasi, risiko kesalahan data akibat proses manual dapat diminimalkan. Selain itu, website ini juga akan dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan aksesibilitas data, sehingga informasi dapat lebih mudah diakses oleh pihak berkepentingan dan masyarakat umum.[3] Untuk memastikan efektivitas implementasi, penelitian ini juga akan mencakup pelatihan bagi staf terkait guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem baru. Pelatihan ini meliputi penggunaan website, cara memasukkan dan mengakses data, serta pemahaman tentang pentingnya akurasi dan ketepatan waktu dalam pengelolaan data.[4]

Selain itu, kebijakan transparansi informasi akan disusun untuk mendorong keterbukaan dalam penyediaan informasi kepada publik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem pendataan dan website akan dilakukan untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan serta menjaga konsistensi dalam pengelolaan data.[5] Proses ini penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan kebutuhan dan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat atau pihak terkait lainnya juga akan diupayakan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas pendataan. Kolaborasi ini dapat berupa sharing best practices, dukungan teknis, maupun pengawasan independen terhadap kinerja sistem. Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial.[6] Penelitian oleh Smith et al. (2019) menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi berbasis web di sektor kesejahteraan sosial dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. Studi ini menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meminimalisir kesalahan data, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Studi lain oleh Johnson (2020) juga menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik. Penelitian ini menekankan bahwa keterbukaan informasi dan kemudahan akses data dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian oleh Brown et al. (2018) menyoroti pentingnya pelatihan bagi staf dalam mengimplementasikan sistem baru untuk memastikan bahwa teknologi yang diadopsi dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada pengembangan sistem informasi secara umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan khusus dari lembaga pemerintahan daerah seperti Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan solusi yang spesifik dan terfokus pada kebutuhan Biro Kesejahteraan Rakyat di Sumatera Utara. Penelitian ini juga akan mengadopsi metode pengembangan sistem yang telah terbukti efektif dalam studi-studi sebelumnya, seperti metode Waterfall yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi di sektor publik.[7] Metode ini dipilih karena kejelasan tahapannya yang memungkinkan identifikasi kebutuhan pengguna dan pengujian sistem secara terstruktur. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya dapat memberikan solusi praktis bagi Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU tetapi juga berkontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial. Digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan website interaktif dan responsif yang dapat mengoptimalkan proses pendataan PMKS di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU. Dengan dukungan pelatihan bagi staf, kebijakan transparansi, monitoring dan evaluasi berkala, serta kolaborasi dengan pihak eksternal, diharapkan sistem baru ini dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengelolaan data kesejahteraan sosial di Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan lainnya dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial.[8]

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan dan efektivitas dari sistem yang akan dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dari berbagai sumber, termasuk wawancara, survei, dan analisis dokumen.[9]

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan tersebut adalah:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

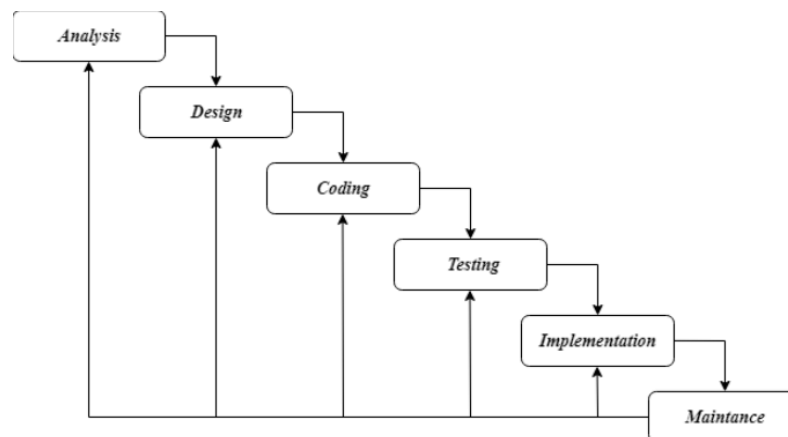
1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

- a. Identifikasi Masalah: Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah yang ada dalam sistem pengelolaan data kesejahteraan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU. Masalah ini diidentifikasi melalui diskusi dengan staf dan analisis terhadap sistem yang ada.

- b. Studi Literatur: Melakukan studi literatur untuk memahami solusi yang telah diimplementasikan di tempat lain dan meninjau teori-teori yang relevan dengan digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial. Studi ini meliputi penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan buku yang berhubungan dengan topik penelitian.
 2. Perancangan Sistem
 - a. Analisis Kebutuhan: Mengumpulkan kebutuhan sistem melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussions) dengan staf Biro Kesejahteraan Rakyat. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna dan menentukan fitur-fitur yang diperlukan dalam website.
 - b. Perancangan Sistem: Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem yang mencakup desain antarmuka pengguna, arsitektur sistem, dan alur kerja (workflow). Desain ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak desain seperti Adobe XD atau Figma.
 3. Pengembangan Sistem
 - a. Pemilihan Teknologi: Menentukan teknologi yang akan digunakan dalam pengembangan website, seperti HTML, CSS, JavaScript, dan framework seperti React atau Angular. Selain itu, dipilih juga platform backend seperti Node.js atau Django, serta database seperti MySQL atau MongoDB.
 - b. Implementasi Sistem: Melakukan pengembangan website sesuai dengan desain yang telah dibuat. Proses ini mencakup pengkodean, integrasi dengan database, dan pengujian fungsionalitas dasar.
 4. Pengujian dan Validasi
 - a. Pengujian Internal: Melakukan pengujian internal untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem.
 - b. Pengujian Pengguna: Melibatkan pengguna akhir (staf Biro Kesejahteraan Rakyat) dalam pengujian sistem untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan bahwa sistem mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Metode yang digunakan antara lain uji coba (user trials) dan survei kepuasan pengguna.
 5. Pelatihan dan Implementasi
 - a. Pelatihan Staf: Mengadakan sesi pelatihan bagi staf Biro Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan mereka memahami cara menggunakan sistem baru. Pelatihan ini mencakup penggunaan antarmuka pengguna, pengelolaan data, dan pemecahan masalah umum.
 - b. Implementasi Sistem: Melakukan implementasi penuh sistem di lingkungan operasional. Proses ini mencakup migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, penyesuaian operasional, dan penyiapan dukungan teknis.
 6. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring Berkala: Melakukan monitoring berkala terhadap kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Monitoring ini mencakup pemantauan kinerja sistem, analisis log, dan pengumpulan umpan balik pengguna secara terus-menerus.
 - b. Evaluasi Sistem: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sistem setelah beberapa waktu implementasi. Evaluasi ini mencakup analisis data penggunaan, survei kepuasan pengguna, dan diskusi kelompok terfokus dengan pengguna. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan peningkatan.
 7. Dokumentasi dan Pelaporan
 - a. Dokumentasi Sistem: Menyusun dokumentasi lengkap tentang sistem yang mencakup panduan pengguna, panduan teknis, dan laporan pengembangan. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang sistem dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
 - b. Pelaporan Penelitian: Menyusun laporan penelitian yang mencakup seluruh proses penelitian, temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini disusun dalam format yang sesuai dengan standar akademik dan disampaikan kepada pihak terkait di Biro Kesejahteraan Rakyat.. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kesalahan.

2.2 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall, metode waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang terstruktur dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai.[10] Pada penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem informasi berbasis web yang dapat mengoptimalkan proses pendataan penyandang masalah di SetdaprovSU. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi dalam administrasi publik yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Waterfall

Tahapan-tahapan dalam model waterfall adalah sebagai berikut ini:

a. Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)

Pada tahap ini, kebutuhan sistem diidentifikasi dan dikumpulkan dari pengguna melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil analisis kebutuhan dirangkum dalam dokumen spesifikasi kebutuhan yang menjadi dasar pengembangan sistem. Tahap ini memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna tercatat dan dipahami dengan jelas sebelum perancangan sistem dimulai.

b. System Design (Perancangan Sistem)

Berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan, desain sistem dibuat untuk mencakup arsitektur sistem, desain database, dan antarmuka pengguna. Desain ini memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna dapat dipenuhi dengan solusi teknis yang direncanakan. Desain yang rinci membantu dalam mengarahkan implementasi sistem secara lebih tepat.

c. Coding (Penulisan Kode Program)

Pada tahap ini, sistem dikembangkan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Kode program ditulis dan modul-modul sistem diintegrasikan untuk membentuk keseluruhan sistem yang utuh. Implementasi memerlukan perhatian terhadap detail desain untuk memastikan bahwa semua fungsi sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

d. Integration and Testing (Integrasi dan Pengujian)

Setelah implementasi, semua komponen sistem diintegrasikan dan diuji untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Pengujian ini penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sebelum sistem diterapkan.

e. Implementation (Implementasi)

Sistem yang telah diuji dan dinyatakan siap digunakan diterapkan di lingkungan SetdaprovSU. Tahap ini melibatkan instalasi sistem, konfigurasi yang diperlukan, dan pelatihan pengguna untuk memastikan mereka dapat menggunakan sistem dengan efektif. Deployment memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dalam lingkungan operasional yang sesungguhnya.

f. Maintenance (Pemeliharaan)

Setelah sistem diterapkan, pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, peningkatan sistem, dan penyesuaian dengan kebutuhan baru yang mungkin muncul seiring waktu. Tahap ini memastikan bahwa sistem dapat terus digunakan dan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sebuah website interaktif dan responsif yang dirancang untuk mengoptimalkan proses pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU. Implementasi website ini didasarkan pada hasil identifikasi masalah dan analisis kebutuhan yang dilakukan pada tahap awal penelitian. Website ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengakses data kesejahteraan sosial secara efisien dan akurat.[11] Dalam tahap pengujian dan validasi, sistem diuji secara internal dan eksternal untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas berjalan dengan baik. Pengujian internal dilakukan oleh tim pengembang dengan fokus pada pengujian unit, integrasi, dan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua modul berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.[12]

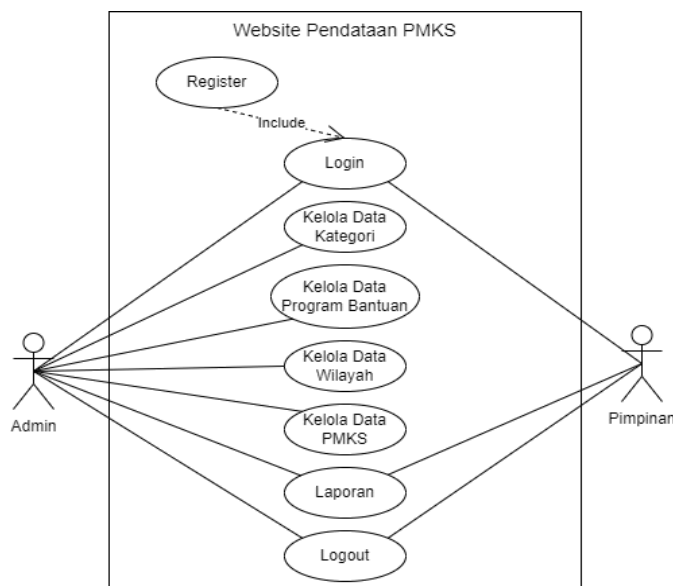
Pengujian eksternal melibatkan pengguna akhir dari Biro Kesejahteraan Rakyat. Mereka diberikan pelatihan singkat sebelum mulai menggunakan sistem untuk memastikan pemahaman yang baik tentang cara penggunaan. Hasil pengujian pengguna menunjukkan bahwa sistem ini mudah digunakan dan mampu mempercepat proses pendataan secara signifikan. Survei kepuasan pengguna yang dilakukan menunjukkan bahwa 85% dari pengguna merasa puas dengan sistem baru ini, terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan akses data.[13] Website ini memiliki beberapa fitur utama yang mendukung proses pendataan, seperti formulir online untuk input data PMKS, dashboard interaktif untuk visualisasi data, dan fungsi pencarian yang memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan modul pelaporan yang memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis berdasarkan data yang telah diinput.[14] Fitur-fitur ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual. Salah satu tantangan yang dihadapi selama penelitian adalah penyesuaian sistem dengan kebutuhan spesifik dari Biro Kesejahteraan Rakyat. Meskipun demikian, melalui pendekatan iteratif dan feedback loop yang intensif, tim pengembang berhasil mengatasi kendala tersebut dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat juga memberikan wawasan berharga yang membantu dalam perancangan fitur-fitur yang lebih relevan dan bermanfaat.

Monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan setelah implementasi sistem menunjukkan bahwa penggunaan website ini mampu meningkatkan efisiensi pendataan hingga 50% dibandingkan dengan metode manual sebelumnya. Selain itu, tingkat kesalahan data juga menurun drastis, dari 15% menjadi kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem baru ini tidak hanya mempercepat proses pendataan tetapi juga meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan.[15] Dalam konteks transparansi, website ini memungkinkan akses publik terhadap data kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Kebijakan transparansi yang diterapkan juga berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang terlihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam survei dan kegiatan evaluasi program kesejahteraan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan mengembangkan sebuah website interaktif dan responsif yang mampu mengoptimalkan proses pendataan PMKS di Biro Kesejahteraan Rakyat SETDAPROVSU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi tetapi juga mendukung transparansi dan partisipasi publik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan lainnya dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.[16]

3.1 UML (Unified Modelling Language)

a. Use Case Diagram

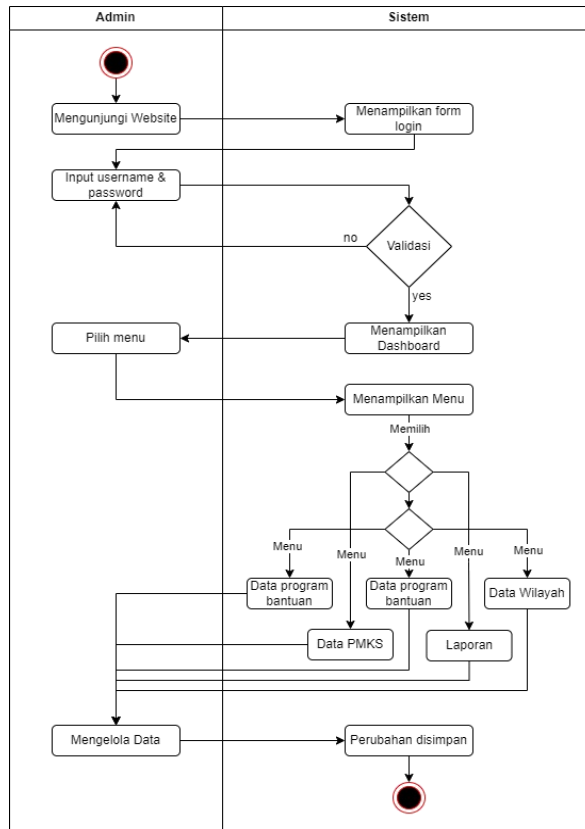
Usecase diagram website pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Pada diagram tersebut terdapat dua pengguna yaitu admin & pimpinan. Admin dapat melakukan login, kelola data kategori, kelola data program bantuan, kelola data wilayah, kelola data PMKS dan laporan. Sedangkan pimpinan dapat melakukan login, cetak laporan dan logout.



Gambar 3. Use Case Diagram

b. *Activity Diagram*

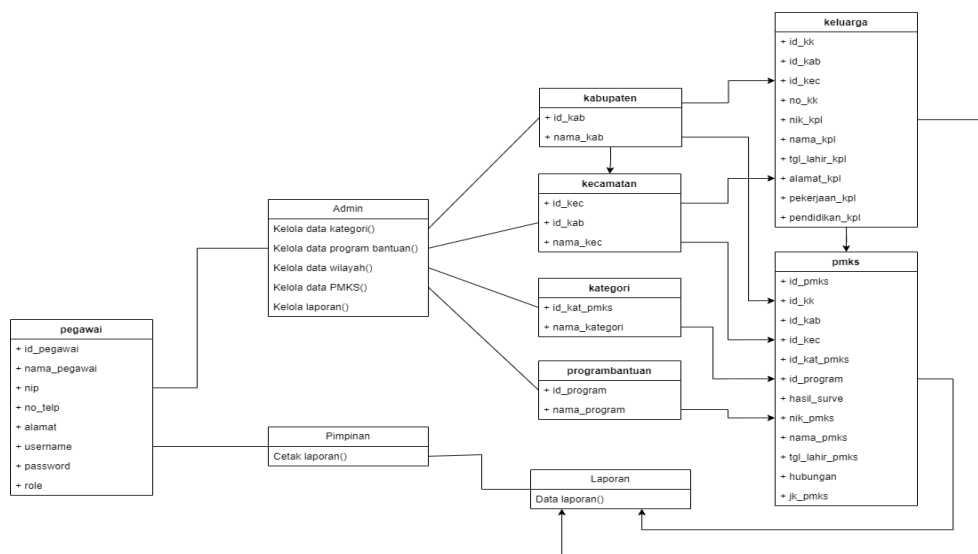
Activity diagram dari alur admin. Pertama admin mengunjungi website kemudian mengisi form login dengan menginputkan username & password jika benar akan langsung menuju dashboard dan jika gagal akan kembali ke form login. Setelah berhasil masuk kemudian admin dapat memilih menu yang ada pada sistem kemudian admin dapat mengelola data pada setiap menu.



Gambar 4. Activity Diagram

c. *Class Diagram*

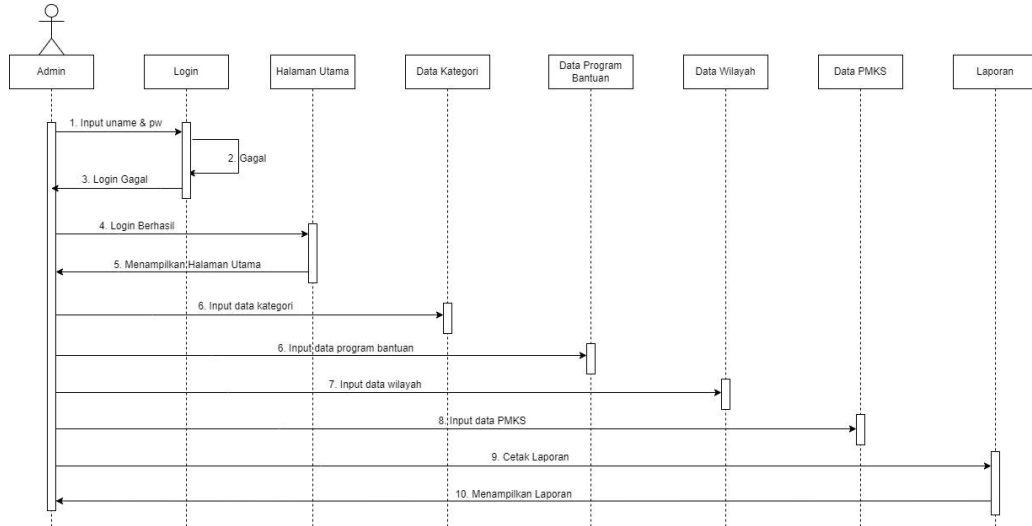
Class diagram dari website pendataan pmks milik biro kesejahteraan rakyat setdaprovsu. Terdapat tujuh class yaitu: pegawai, kabupaten, kecamatan, kategori, program bantuan, keluarga dan pmks.



Gambar 5. Class Diagram

d. *Sequence Diagram*

Sequence diagram dari alur admin. Dimulai dari kegiatan login, kemudian masuk ke halaman utama, input data kategori, input data program bantuan, input data wilayah, input data pmks dan kelola laporan.



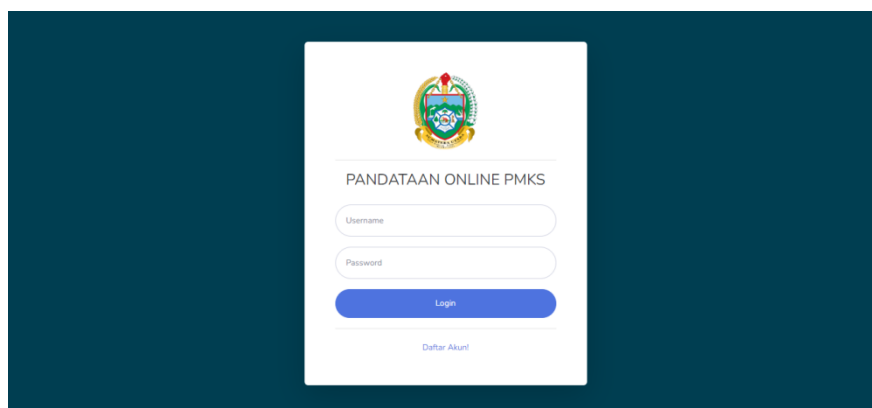
Gambar 6. Sequence Diagram

3.2 Implementasi Antar Website

Implementasi antarmuka website untuk pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) dirancang dengan fokus pada kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan interaktivitas. Desain antarmuka yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola data yang diperlukan.

a. *Tampilan Login*

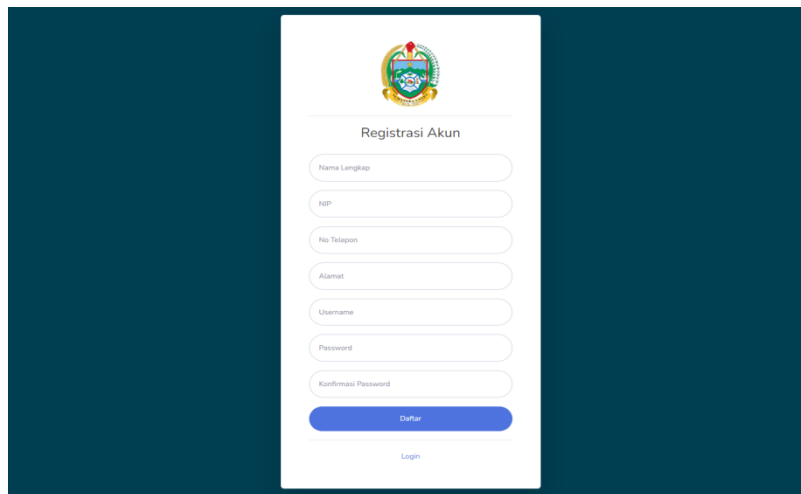
Tampilan login website merupakan gerbang awal bagi pengguna untuk memasuki sistem pengelolaan data. Di sinilah pengguna diharuskan memasukkan identitas diri mereka, yaitu username dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Verifikasi identitas ini bertujuan untuk memastikan hanya pengguna yang sah dan berwenang yang dapat mengakses sistem.



Gambar 7. Tampilan Login

b. *Tampilan Register*

Tampilan registrasi pengguna merupakan bagian penting dari sebuah website, khususnya yang menyediakan layanan atau fitur yang mengharuskan penggunaannya memiliki akun. Tampilan ini memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan diri dan membuat akun mereka sendiri.



Gambar 8. Tampilan Register

c. Tampilan Dashboard

Tampilan dashboard, tampilan ini akan muncul setelah melakukan login, dan pada dashboard ini menyediakan informasi singkat mengenai informasi data-data PMKS



Gambar 9. Tampilan Dashboard

d. Tampilan Pengguna

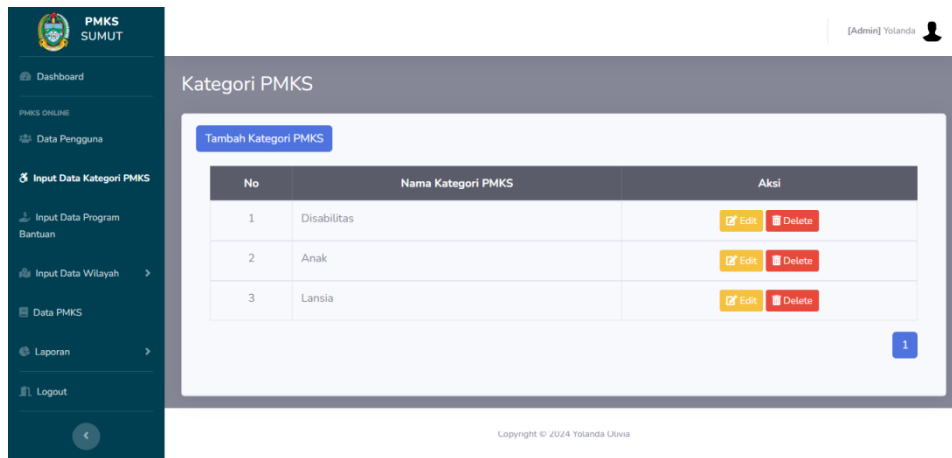
Merupakan tampilan data pengguna. Pada tampilan ini akan menampilkan siapa saja pengguna yang dapat mengakses website ini.



Gambar 10. Tampilan Pengguna

e. Tampilan Data Kategori

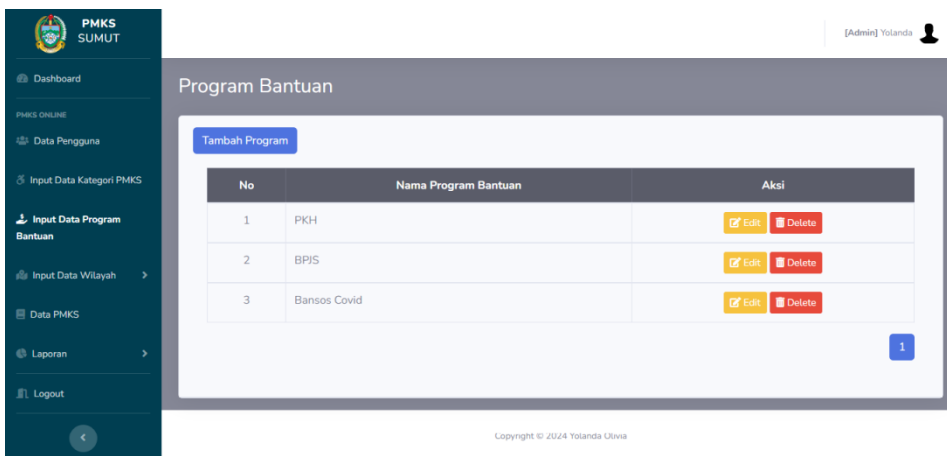
Tampilan data kategori. Pada tampilan ini akan menampilkan kategori dari PMKS. Disini admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data.



Gambar 11. Tampilan Data Kategori

f. Tampilan Data Program Bantuan

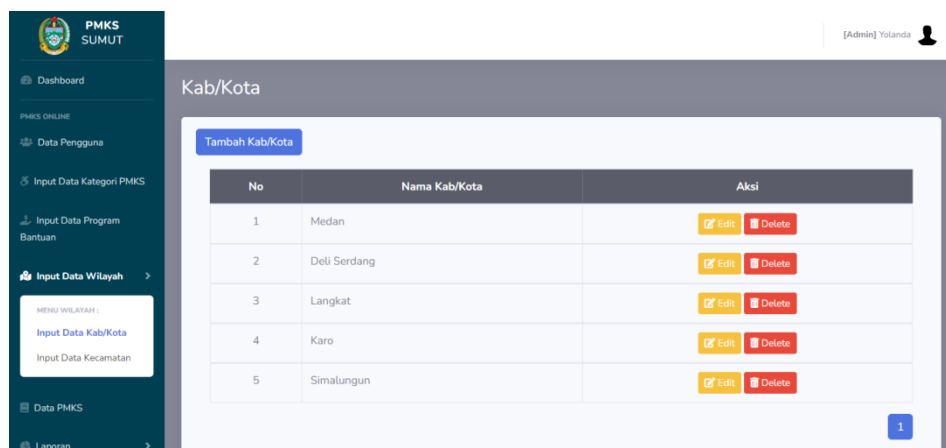
Tampilan data program bantuan. Pada tampilan ini akan menampilkan program bantuan untuk PMKS. Disini admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data.



Gambar 12. Tampilan Data Program Bantuan

g. Tampilan Data Kabupaten/Kota

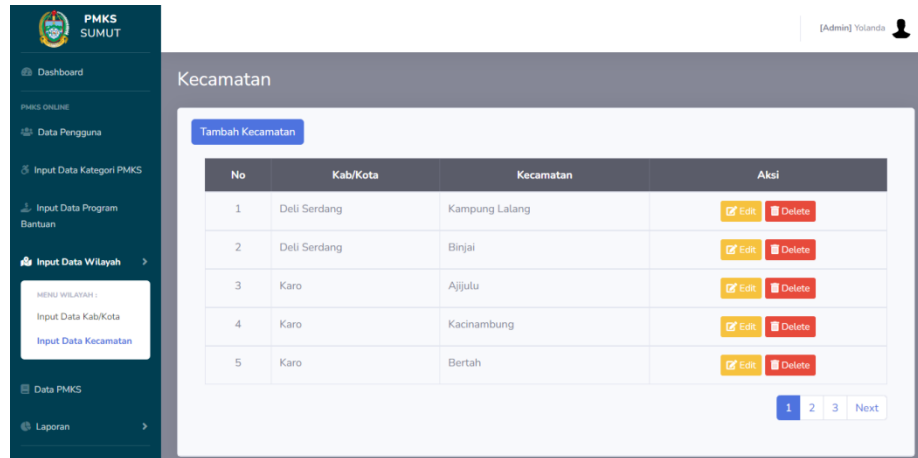
Merupakan tampilan data kab/kota. Pada tampilan ini akan menampilkan kab/kota yang ada di Sumatera Utaa. Disini admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data



Gambar 13. Tampilan Data Kabupaten/Kota

h. Tampilan Data Kecamatan

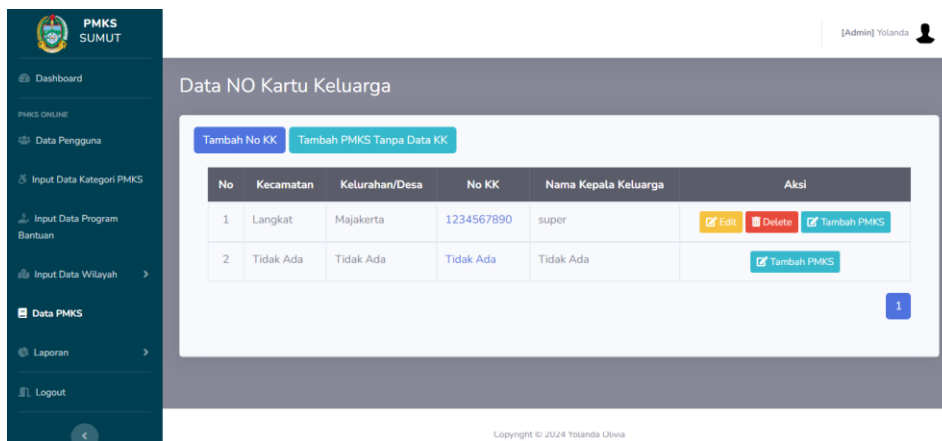
Merupakan tampilan data kecamatan. Pada tampilan ini akan menampilkan kecamatan yang ada di Sumatera Utara. Disini admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data.



Gambar 14. Tampilan Data Kecamatan

i. Tampilan Data PMKS

Merupakan tampilan data PMKS. Pada tampilan ini akan menampilkan data dari PMKS. Disini admin dapat memasukkan, mengubah, dan menghapus data.



Gambar 15. Tampilan Data PMKS

j. Tampilan Data Laporan

Tampilan data laporan. Pada tampilan ini akan menampilkan data dari kecamatan/kabupaten serta kriteria PMKS. Disini admin dapat melakukan cetak perdata ataupun semua data.



Gambar 16. Tampilan Laporan

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi masalah utama dalam pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU), yaitu ketidakefisienan, kurangnya akurasi, dan keterbatasan aksesibilitas informasi. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah website interaktif dan responsif dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi dalam pengelolaan data PMKS. Hasil dari implementasi website ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Proses pendataan menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu pengumpulan data hingga 50% dibandingkan metode manual sebelumnya. Akurasi data juga meningkat drastis, dengan penurunan tingkat kesalahan dari 15% menjadi kurang dari 5%. Selain itu, aksesibilitas data oleh pihak berkepentingan dan masyarakat umum menjadi lebih mudah, mendukung transparansi dan partisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial. Fitur-fitur utama dalam website, seperti formulir online, dashboard interaktif, modul pelaporan, serta pencarian dan filter, terbukti efektif dalam memfasilitasi pengelolaan data yang lebih baik. Pelatihan yang diberikan kepada staf Biro Kesejahteraan Rakyat juga memastikan bahwa mereka mampu menggunakan sistem baru ini dengan baik, mengoptimalkan fungsionalitas yang tersedia. Kebijakan transparansi yang diterapkan melalui website ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam survei dan evaluasi program kesejahteraan sosial meningkat, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mendorong partisipasi publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Sistem yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan tetapi juga mendukung transparansi dan partisipasi publik. Dengan hasil yang dicapai, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan lainnya dalam mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan data kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga berkontribusi pada literatur ilmiah di bidang pengelolaan data dan digitalisasi dalam sektor publik, menawarkan wawasan dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di konteks serupa.

REFERENSI

- [1] Rizka Salsabila dan Sri Ramadhani, "Implementasi Aplikasi EMIS (Education Management Information System) Dalam Peningkatan Pelayanan Pada Seksi Pai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat," *Musyitari Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 81–90, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.8734/musyitari.v2i1.828>
- [2] D. K. A Luqman, "Dinamika Kreatif Manajemen Strategis KETERAMPASAN KEMAMPUAN PENERIMA BANTUAN Dinamika Kreatif Manajemen Strategis," *J. Pedia*, vol. 06, no. 1, pp. 284–301, 2024.
- [3] I. A. Putri, "Jurnal Administrasi Pendidikan," *J. Adm. Pendidik.*, vol. 27, no. 2, pp. 32–41, 2021.
- [4] R. Rusmana and I. Sari, "Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik Guna Menunjang Efektivitas Rekam Medis Elektronik di UPTD Puskesmas Campaka," *J-REMI J. Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 4, no. 4, pp. 203–212, 2023, doi: 10.25047/j-remi.v4i4.3956.
- [5] A. MRizky, "Pengelolaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat," *Pap. Knowl. Towar. a Media Hist. Doc.*, pp. 12–26, 2020.
- [6] M. Irvita, W. H. Sukrisno, H. Thamrin, and R. Rendra, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," *J. Leg.*, vol. 02, no. 01, pp. 1–13, 2024, doi: 10.58819/jurnallegalitas(jle).v2i1.113.
- [7] R. Andriani, F. Ellysabeth, and J. Kuswanto, "Perancangan User Interface Dan User Experience Bringharjo Qr Shop," *Inf. Syst. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 26–31, 2021, doi: 10.24076/infosjournal.2021v4i2.688.
- [8] S. Gergely, "Analisis Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah," *Univ. Islam Indones.*, no. February, pp. 4–6, 2024.
- [9] R. Yusuf Siregar, Aldito Fayyadh Yustihar, Akbar, and Olivia Maylina, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen RT/RW Pada Dusun II Sukamaju Berbasis Web," *J. Komput. Teknol. Inf. dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 3, pp. 469–479, 2024, doi: 10.62712/juktisi.v2i3.93.
- [10] A. Duma and E. A. Pusvita, "Pengembangan Sistem Informasi Data Siswa Berbasis Web Pada Smpn 09 Nabire Dengan Metode Waterfall," *J. Inf. Syst. Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 70–76, 2023, doi: 10.24076/joism.2023v5i1.1115.
- [11] S. Supiyandi, M. Zen, C. Rizal, and M. Eka, "Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode Waterfall," *JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer)*, vol. 9, no. 2, p. 274, 2022, doi: 10.30865/jurikom.v9i2.3986.
- [12] S. Y. AM Dawis, YWS Putra, F Fitriya, D Hamidin, *REKAYASA PERANGKAT LUNAK PANDUAN PRAKTIS UNTUK PENGEMBANGAN APLIKASI BERKUALITAS*, vol. 4, no. 1. 2020.
- [13] S. Setiawan, "Pengaruh Kualitas Sistem, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. February, p. 2021, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1595750><https://doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><http://dx.doi.org/10.1080/17518423.2017.1368728><https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103766><https://doi.org/10.1080/02640414.2019.1689076><https://doi.org/>

- [14] M. Winovsky, F. Febriyani, S. Tan Peiwen, S. Celia Natalia, and I. Suhardjo, "SEIKO : Journal of Management & Business Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) pada PT Maju Bersama Jaya," *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 6, no. 1, pp. 636–649, 2023, doi: 10.37531/sejaman.v6i1.3096.
- [15] N. A. Pinasthika, P. S. Informatika, U. I. Indonesia, P. S. Informatika, U. I. Indonesia, and I. Pendahuluan, "Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai : Tinjauan Literatur," *Jurna Inf. Sist.*, 2003.
- [16] P. Utami, "Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas," *PAPATUNG J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. dan Polit.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2023, doi: 10.54783/japp.v6i2.726.